

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, adanya desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, menjadi tuntutan masyarakat atas transparansi dan akuntabilitas. Hal ini memaksa pemerintah baik pusat maupun daerah, untuk mengembangkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan bertanggung jawab, (Rohmah & Nazir, 2022). Fenomena perkembangan laporan keuangan pemerintah saat ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih transparan dalam menyampaikan informasi laporan keuangan kepada pemakainya merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas kinerja keuangan pemerintah, (Halim, 2022). Untuk menyukseskan pembangunan nasional peran anggaran sangat penting dan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Dalam hal ini penggunaan anggaran yang salah dapat membawa dampak yang kurang baik bagi kemajuan pembangunan nasional, untuk itu kita semua harus mengawasi nya terutama pihak yang bertanggungjawab untuk hal itu. Berbicara tentang serapan anggaran, penyerapan anggaran adalah ukuran yang di pakai untuk standar. Semakin banyak anggaran yang terserap maka akan semakin baik, tapi pertanyaan nya adalah apakah anggaran yang terserap itu betul-betul bermanfaat dan untuk tujuan-tujuan yang sesuai dengan visi atau target dari pelayanan yang di inginkan untuk di capai atau anggaran hanya akan di gunakan untuk kepentingan diri sendiri. (Topan Tambariki et al., 2018).

Sistem pemerintahan di negara Indonesia telah mengalami perubahan sistem dari sentralisasi menjadi desentralisasi pada tahun 1998. Pada masa lalu pemerintah Indonesia menganut sistem sentralisasi yang memusatkan seluruh kewenangan berada ditangan pemerintah pusat. Sistem ini kemudian diubah menjadi desentralisasi yang diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan desentralisasi berarti penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan asas otonomi. Tetapi Undang-Undang tersebut telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur urusan pemerintahannya secara mandiri dan kepentingan masyarakat daerah setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan, (Rosana & Bharata, 2023)

Transparansi mengungkapkan laporan keuangan secara sukarela di internet dimanfaatkan bagi seluruh stakeholder untuk memperoleh informasi yang ada di lingkungan pemerintahan. Namun, hanya ada beberapa pemerintahan daerah yang secara sukarela memilih untuk mengambil manfaat dari internet sebagai media dalam melakukan pelaporan keuangan. Alasan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan melakukan atau tidak melakukan pelaporan keuangan di internet secara sukarela dinilai dapat digunakan sebagai media efektif dan efisien dalam pelaporan keuangan. Karena hal ini dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat

akan terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang baik, (Hardiningsih et al., 2021)

Banyaknya permasalahan yang ditemukan terkait laporan keuangan menunjukkan perlu adanya peningkatan terhadap kualitas laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang tepat terkait posisi keuangan dan transaksi dalam entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan. Laporan keuangan berguna untuk memahami nilai sumber daya ekonomi sehingga memudahkan kegiatan operasional pemerintahan, seperti halnya menilai serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, (Mulyati et al., 2020). Menurut, Aswar et al. (2021) laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi dan digunakan sebagai informasi serta bahan untuk proses pengambilan keputusan dan akuntabilitas publik. Terdapat empat karakteristik yang menjadi prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Saat ini, lebih banyak perhatian diberikan pada praktik akuntansi lembaga pemerintah dan organisasi publik lainnya seperti rumah sakit, puskesmas, universitas, dan pemerintah pusat. Puskesmas merupakan suatu unit pelaksana yang berfokus pada pelayanan kesehatan masyarakat sehingga sebagian besar puskesmas tidak begitu memperhatikan terkait kualitas laporan keuangannya. Keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat dari laporan keuangannya. Laporan keuangan yang berkualitas mencerminkan bahwa proses akuntansi dalam organisasi tersebut telah

berjalan dengan baik. UPTD puskesmas bertanggung jawab untuk melaporkan laporan keuangannya secara lengkap dan tepat waktu kepada Dinas Kesehatan yang selanjutnya laporan keuangan tersebut dianalisis dan dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten. Kualitas laporan keuangan dinilai tiap tahunnya oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), (Ifanka & Sari, 2022).

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada publik salah satunya yaitu, melalui Badan Layanan Umum. Pada “Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas”. Satuan kerja yang menerapkan Badan Layanan Umum diberikan fleksibilitas dalam melakukan pengelolaan keuangan antara lain, pengelolaan pendapatan dan belanja, kas, utang dan piutang, investasi serta pengadaan barang dan jasa. Sebagai satuan kerja di lingkungan pemerintah maka Badan Layanan Umum diwajibkan untuk melakukan penyusunan laporan keuangan terkait dengan kegiatan operasionalnya. Dalam penyusunan laporan keuangan BLU, dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, (R. H. Kusuma & Andayani, 2022)

Pelaporan keuangan sektor publik memainkan peran penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan tata kelola pemerintahan, (Yuniar et al., 2023). Seiring

dengan upaya pemerintah di seluruh dunia untuk meningkatkan praktik manajemen keuangan mereka, permintaan akan laporan keuangan yang komprehensif dan transparan semakin meningkat, (Indeche et al., 2022). Transparansi dalam keuangan sektor publik melibatkan pengungkapan yang jelas atas informasi keuangan yang jujur, akurat, dan lengkap, sehingga memungkinkan para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang tepat, (Yunia & Muttaqin, 2022). Akuntabilitas memastikan bahwa entitas pemerintah bertanggung jawab atas keputusan keuangan dan pengelolaan sumber daya mereka, (Adil, 2022). Meningkatnya fokus pada prinsip-prinsip ini telah mendorong berbagai reformasi dan adopsi kerangka kerja akuntansi standar yang serupa dengan yang ada di sektor swasta, (Wolanin, 2022). Namun demikian, penerapan prinsip-prinsip ini dalam manajemen keuangan publik sangat bervariasi di berbagai wilayah dan tingkat pemerintahan, (Maqdliyan, 2022). Kompleksitas akuntansi sektor publik, yang melibatkan beragam pemangku kepentingan dengan berbagai kepentingan, menghadirkan tantangan unik dalam mencapai tingkat transparansi dan akuntabilitas yang diinginkan, (Natisation et al., 2022).

Terlepas dari pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan sektor publik, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar dalam memahami dampak komprehensif dari praktik-praktik ini terhadap tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik. Studi yang ada memberikan wawasan yang terpisah-pisah tanpa analisis yang kohesif tentang bagaimana praktik-praktik ini diterapkan secara global dan seberapa efektif praktik-praktik tersebut dalam mencapai hasil yang diharapkan. Selain itu, ada kebutuhan untuk mengeksplorasi

interaksi antara kerangka kerja peraturan, kemajuan teknologi, dan faktor budaya dalam membentuk praktik-praktik ini, (Judijanto et al., 2024).

Penerapan teknologi digital hadir sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Teknologi digital memungkinkan pemerintah untuk mengelola data keuangan dengan lebih efisien dan akurat, serta mempermudah akses publik terhadap informasi keuangan. Dengan sistem berbasis digital, pengelolaan anggaran, pelaporan, dan audit menjadi lebih terintegrasi dan transparan. Teknologi ini juga memungkinkan real-time tracking yang dapat meningkatkan pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan dana publik, sehingga memperkecil peluang terjadinya kecurangan (Karmila et al., 2014; Kuncahyo & Dharmakarja, 2022). Urgensi penerapan teknologi digital dalam mendukung transparansi keuangan pemerintah semakin tinggi, terutama di era digital saat ini. Dengan adopsi teknologi digital, pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas public yang berkelanjutan, (Muzakki & Fahriani, 2022). Teknologi ini juga mendukung pencapaian efisiensi yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya, karena proses pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data dapat dilakukan secara otomatis, (Wiyana, 2024). Oleh karena itu, penerapan teknologi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan bagi pemerintahan modern untuk memenuhi tuntutan transparansi yang semakin meningkat.

Hubungan antara kepala daerah sebagai anggota masyarakat dan kepala daerah sebagai agen yang dipilih oleh masyarakat. Pemerintah daerah bertanggung

jawab atas wewenang yang diberikan kepada masyarakat (Larasati Agustina & Bagianto,2019). Dewan Perwakilan Rakyat daerah turut berperan dalam pengembangan fungsi pengawasan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan kualitas pemerintah daerah, kebutuhan masyarakat dapat digunakan sebagai acuan agar pemerintah daerah dapat beroperasi dengan baik serta menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan terbuka, (indrayani&widiastuti,2020).

LAKIP melahirkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah dikelola secara transparan dan akuntabel guna menciptakan good governance.Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara khususnya pasal 32 juga menjelaskan bahwa isi dan bentuk laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), (R. H. Kusuma & Andayani, 2022).

Implementasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di sektor publik. Akuntansi berbasis akrual memungkinkan pencatatan pendapatan dan beban pada saat terjadinya transaksi, tanpa memperhitungkan kapan kas diterima atau dibayarkan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi, relevansi, dan transparansi pelaporan keuangan di instansi pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), akuntansi berbasis akrual mulai diterapkan secara bertahap di Indonesia sejak tahun 2015, (Rahayu et al., 2023). Transformasi ini

merupakan bagian dari reformasi keuangan negara yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik di tingkat pusat dan daerah.

Pelaksanaan atas perubahan regulasi sistem akuntansi berbasis kas menjadi akrual, membutuhkan kesiapan pemerintah yang cukup tinggi. Berhasil atau tidaknya penerapan akuntansi berbasis akrual dalam sistem pelaporan keuangan tergantung dari kesiapan organisasi pemerintah itu sendiri. Kesiapan pemerintah dapat ditunjukkan dari faktor kualitas teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia. Organisasi pemerintah yang siap maka akan mendukung regulasi pemerintah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, (Enita Binawati, 2020)

Untuk itu pemerintah harus mengukur kinerja dari organisasi-organisasi yang bergerak di bagian sektor publik agar dapat mengetahui sejauh mana penggunaan anggaran tersebut, sejauh mana serapan anggaran yang terlaksana agar tujuan-tujuan pembangunan nasional bisa di raih. Dalam sektor kesehatan juga sangat penting dalam menyukseskan pembangunan nasional, untuk itu penggunaan dana dalam sektor ini cukup besar dan sangat kurang baik bila pengawasan kinerja di sektor ini tidak di ukur. Untuk itu proses pembangunan di bidang kesehatan perlu untuk di ukur agar penggunaan anggaran bisa di ketahui dengan harapan dapat membantu pembangunan nasional secara umum, (Topan Tambariki et al., 2018)

Penelitian Zubaidah & Nugraeni, (2023) dan Soedarman et al., (2024) mengungkapkan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, penelitian (Putri, 2022) menjelaskan

bahwa transparan memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Karena adanya hal-hal yang dapat menggoyahkan untuk bertindak secara transparan. Sehingga terjadi kegagalan bersikap transparan dalam menjalankan profesinya.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tentang penerapan teknologi digital dalam meningkatkan transparansi keuangan pemerintah, namun masih minim kajian empiris yang secara spesifik menilai seberapa jauh teknologi ini mempengaruhi transparansi keuangan, khususnya di sektor publik Indonesia. Research gap ini menjadi landasan bagi penelitian ini, yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana teknologi digital diterapkan dalam pengelolaan keuangan pemerintah dan menilai dampak penerapannya terhadap transparansi keuangan.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS DIGITALISASI LAPORAN KEUANGAN, TRANSPARANSI, AKUNTANDI BERBASIS AKRUAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA PUSKESMAS DI KOTA BEKASI”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah yang akan dilakukan antara lain:

- a. Apakah Digitalisasi Laporan Keuangan berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan di Puskesmas Kota Bekasi?

- b. Apakah Transparansi berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan di Puskesmas Kota Bekasi?
- c. Apakah Akuntansi Berbasis Akrual berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan di Puskesmas Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang di kemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah Digitalisasi Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Puskesmas Kota Bekasi.
- b. Untuk mengetahui apakah Transparansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Puskesmas Kota Bekasi.
- c. Untuk mengetahui apakah Akuntansi Berbasis Akrual berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Puskesmas Kota Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka penulis berharap dapat memberikan manfaat atas penelitian, antara lain:

1.4.1 Bagi Akademis

1. Bagi Akademik, diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan bukti empiris pada pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya mengenai digitalisasi, transparansi, akuntansi berbasis akrual di Puskesmas Bekasi terhadap laporan keuangan. Menjadi contoh maupun rujukan untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi Peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan wawasan dan informasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah serta sebagai alat

uji kemampuan dalam menerapkan teori yang diperoleh di saat perkuliahan dengan praktik nyata

1.4.2 Bagi Praktisi

1. Bagi Puskesmas di wilayah kota Bekasi, dapat memberikan informasi dan masukan kepada pihak kantor pelayanan publik untuk menelaah lebih lanjut dalam upaya meningkatkan laporan keuangan di Puskesmas.
2. Bagi Pegawai Puskesmas di wilayah kota Bekasi yang Mengelola Keuangan, diharapkan memberi kontribusi bagi para pegawai yang ada agar menambah pengetahuan tentang pentingnya digitalisasi, transparansi dan akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga dapat menambah value masing-masing pegawai untuk dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Agar penulisan pada penelitian ini lebih terarah dan hasil penelitian menjadi lebih jelas, maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Teknis Tugas Akhir yang diterbitkan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai pedoman, yaitu sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang pendahuluan pada penelitian yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang tinjauan Pustaka yaitu teori yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu digitalisasi laporan keuangan, transparansi, kualitas laporan keuangan, telaah empiris, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai rancangan penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, definisi operasional variable, waktu dan tempat penelitian, serta prosedur analisis data semuanya dibahas dalam bab ini karena mempertahankan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai rancangan penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, definisi operasional variable, waktu dan tempat penelitian, serta prosedur analisis data

semuanya dibahas dalam bab ini karena mempertahankan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini penulis menjelaskan informasi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari keseluruhan hasil penelitian yang didapat dalam pembahasan juga mengenai keterbatasan serta saran yang diberikan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti hal yang sama.

